



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**2023**

# **RENCANA KERJA**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 52A TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II  
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip *money follow program*, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2023 serta mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pagu anggaran serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V  
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Renja 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.

- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007



**RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja. Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Selain itu, Renja ini juga mempedomani Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2023, dimana selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2023 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita bersama untuk mencapai Bangka Setara yang lebih nyaman untuk semua. Amin.

Sungailiat, Agustus 2022

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Bangka,



**Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661214 199203 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1.Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2.Landasan Hukum</b> .....	2
<b>1.3.Maksud dan Tujuan</b> .....	5
<b>1.4.Sistematika Penulisan</b> .....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
<b>2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian</b>	
<b>Renstra Perangkat Daerah</b> .....	7
<b>2.2.Analisis Kinerja Pelayanan OPD</b> .....	26
<b>2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi</b>	
<b>Analisis Kinerja Pelayanan OPD</b> .....	28
<b>2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD</b> .....	31
<b>2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</b> .....	65
<b>BAB III. TUJUAN</b>	
<b>3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional</b> .....	66
<b>3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda</b> .....	68
<b>3.3.Program dan Kegiatan</b> .....	69
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	72
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	91

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Setelah proses penyusunan Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2023 yang dimulai pada minggu pertama bulan Desember tahun 2021, penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja pada Februari sampai Maret 2022, saat ini penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 memasuki tahap berikutnya, yaitu tahapan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan akhir RKPD. Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2023 selain mengacu kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 juga memuat pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud. Pemetaan dimaksud telah dimulai pada saat penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja Bappeda Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);

27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Berita Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2022 Nomor 44;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai bahan dalam tahapan proses penyusunan perencanaan yaitu bahan forum konsultasi publik, forum perangkat daerah dan Musrenbang Tahun Anggaran 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

**BAB I**                    **PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.



- BAB II** **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,**  
berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian  
Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting  
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review Terhadap Renstra OPD.
- BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,** berisi tentang : Telaahan  
terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja  
Perangkat Daerah.
- BAB IV** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;**
- BAB V** **PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2021 Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Bangka mencapai Rp. 7.663.615.650,00 untuk pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 5.794.236.766,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 75,61%. Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran Bappeda adalah sebesar Rp. 8.132.008.200,00 untuk pelaksanaan 2 penunjang urusan pemerintahan, 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Capaian kinerja diharapkan mencapai 100 persen. Dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, pandemi covid-19 telah memberikan pengaruh nyata. Kondisi ini juga masih mempengaruhi target kinerja Bappeda tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda 2019-2023. Beberapa target kinerja pada level sub kegiatan mengalami rasionalisasi sebagai dampak refocusing anggaran yang merupakan kebijakan nasional dalam upaya mengatasi dampak pandemi covid-19. Walaupun demikian, target kinerja Bappeda secara umum diharapkan masih dapat dicapai sesuai perencanaan strategis melalui pendekatan pelaksanaan kegiatan secara non budgeting.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, capaian IKU Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2021**

No	Indikator	Capaian 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	92,00	65,22
2.	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang Sesuai RPJMD	83,50	83,50	92,50	<b>110,78</b>	88,00	105,17
3.	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	62,50	50,00	83,33	<b>166,67</b>	100,00	83,33
4.	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	60,00
5.	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	A (84,61)	A (85,00)	-	-	-	-

Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2023. Capaian atas indikator sasaran dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sementara capaian atas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Secara detail capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Tabel 2.2. dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)**  
**Kabupaten Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021		Realisasi Renja PD sampai Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02	Urusan Perencanaan												
4.02.0 1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	80%	20%	100%	1.114.393.300	100%	951.571.564	100%	85.39%	100%	60%	60%
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah											
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	40%	0%		0%		100%		0%	0%	80%

		<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>70,08</b>	<b>62,42</b>		<b>62,42</b>		<b>100%</b>		<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>71,51</b>
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>133,33</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>133,33</b>
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>100</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	40%	100%	15.332.800,00	100%	7.327.000,00	100%	47,79%	100%	80%	80%
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	40%	100%		100%		100%	47,79%	100%	80%	80%
01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	8.506.800	6 Dokumen	3.676.400	100%	43.22%	6 Dokumen	24 Dokumen	80%
01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	6.826.000	5 Dokumen	3.650.600	100%	53.48%	5 Dokumen	20 Dokumen	80%
01.01	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai	100%	40%	100%	5.439.003.000	100%	4.000.907,135	100%	73,56%	100%	80%	80%

		standar											
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	5.439.003.000	12 Bulan	4.000.907.135	100%	73,56%	12 Bulan	48 Bulan	80%
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	70 Dokumen	28 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen		100%		14 Dokumen	56 Dokumen	80%
01.06	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50%	48%	0%	0	22,58%	0	0%	225,80%	0%	22,58%	45,16%
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
01.08	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	84 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	80 Stel	16 Stel	0	0	0	0	0	0	16 Stel	32 Stel	40%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	44 Orang	15 Orang	0	0	5 Orang	0	500%	0	0	20 Orang	45,5%
01.18	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung	100%	40%	100%	350.223.000	100%	302.084.103	100%	86.25%	100%	80%	80%

		Kinerja Perangkat Daerah											
01.19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	359.402.900	12 Bulan	275.537.706	100%	76,67%	12 Bulan	48 Bulan	80%
		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 Bulan	48 Bulan	80%
01.06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	42,8%	100%	84.404.700	100%	78.940.000	100%	93,53%	100%	75%	75%
01.19	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Paket	1 Paket	0	84.404.700	0	78.940.000	0	93,53%	1 Paket	2 Paket	75%
		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Paket	2 Paket	1 Paket		1 Paket		100%		1 Paket	3 Paket	75%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	40%	100%	606.914.350	100%	528.088.555	100%	87,01%	100%	80%	80%
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan		3 Layanan		100%		3 Layanan	80%	80%

		informasi											
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	459.119.750	12 Bulan	425.673.146	100%	92,72%	12 Bulan	48 Bulan	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	101.048.400	12 Bulan	57.632.397	100%	57,03%	12 Bulan	48 Bulan	80%
		Jumlah layanan updating website yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 Bulan	48 Bulan	80%
		Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 Bulan	48 Bulan	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	46.746.200	12 Bulan	44.783.012	100%	95,08%	12 Bulan	48 Bulan	80%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	40%	100%	208.950.000	100%	127.792.521	100%	61,16%	100%	80%	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	171.850.000	5 Unit	111.724.321	100%	65,01%	5 Unit	5 Unit	80%



	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	150 Unit	75 Unit	25 Unit	37.100.000	25 Unit	16.068.200	100%	43,31%	25 Unit	125 Unit	83,33%
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD</b>	100%	40%	100%	448.191.600	100%	380.265.000	100%	84,84%	100%	80%	80%
		<b>Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD</b>	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		<b>Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD</b>	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		<b>Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN</b>	75%	133,33%	100%		100%		100%		100%	133,33%	133,33%
		<b>Persentase Keselarasan RKPD terhadap RKP</b>	80%	50%	100%		100%		100%		100%	102,56%	102,56%
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	40%	100%	448.191.600	100%	380.265.000	100%	84,84%	100%	80%	80%

		Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase aspek dalam perencanaan lima tahunan daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan nasional	75%	133,33%	100%		100%		100%		100%	133,33%	133,33%
		Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per	80%	50%	100%		100%		100%		100%	102,56%	102,56%

		urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional											
		Persentase aspek dalam Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi	170 Dokumen	68 Dokumen	34 Dokumen	24.850.000	34 Dokumen	21.672.500	100%	87,21%	34 Dokumen	136 Dokumen	80%
		Jumlah dokumen usulan perencanaan kegiatan nasional dan propinsi yang diverifikasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%
	Sub Kegiatan Konsultasi	Jumlah Forum Perangkat	5 Kali	2 Kali	1 Kali	94.100.000	1 Kali	88.200.000	100%	93,73%	1 Kali	4 Kali	80%

	Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Daerah yang dilaksanakan											
		Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	5 Kali	2 Kali	1 Kali		1 Kali		100%		1 Kali	4 Kali	80%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti	5 Kali	2 Kali	1 Kali	226.166.800	1 Kali	181.905.900	100%	80,43%	1 Kali	4 Kali	80%
		Jumlah Musrenbang Propinsi yang diikuti	5 Kali	2 Kali	1 Kali		1 Kali		100%		1 Kali	4 Kali	80%
		Jumlah Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang diikuti	40 Kali	16 Kali	8 Kali		8 Kali		100%		8 Kali	32 Kali	80%
		Jumlah Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tepat waktu	5 Kali	2 Kali	1 Kali		1 Kali		100%		1 Kali	4 Kali	80%
		Jumlah RKA Responsif Gender Perangkat Daerah yang disepakati	20 RKA/OPD	8 RKA/OPD	4 RKA/OPD		4 RKA/OPD		100%		4 RKA/OPD	16 RKA/OPD	80%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	103.074.800	1 Dokumen	88.486.600	100%	85,85%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah dokumen RKPD yang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%

	Daerah Kabupaten/Kota	disusun											
		Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan	100%	40%	100%	189.669.100	100%	153.931.694	100%	81,16	100%	80%	80%
		Persentase data rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yg dimanfaatkan dalam perencanaan	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase Keterisian data	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%

		capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem											
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Daerah yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0%		0 Dokumen	1 Dokumen	20%
		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur ekonomi yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur sosial yang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%

		disusun											
		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi Perencanaan yang dioperasionalkan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	16.546.000	2 Aplikasi	15.472.400	100%	93,51	2 Aplikasi	2 Aplikasi	80%	
	Jumlah layanan operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 Bulan	48 Bulan	80%	
	Jumlah layanan up dating capaian kinerja Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 Bulan	48 Bulan	80%	
	Jumlah dokumen Indeks Persepsi Masyarakat yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%	
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala	100%	40%	100%	163.234.200	100%	120.779.346	100%	73,99	100%	80%	80%	

		Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Perjanjian Kerjanya	34 OPD	34 OPD	34 OPD	103.881.200	34 OPD	73.100.933	100%	70,37%	34 OPD	34 OPD	80%
		Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		2 Dokumen	8 Dokumen	80%
		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	34 OPD	34 OPD	34 OPD		34 OPD		100%		34 OPD	34 OPD	80%
	Sub Kegiatan	Jumlah	5	2	1	59.353.000	1	47.678.413	100%	80,33	1	4	80%



	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen				Dokumen	Dokumen	
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	100%	40%	100%	148.513.000	100%	120.667.809	100%	81,25%	100%	80%	80%
		Persentase rumusan kebijakan yang diintegrasikan dalam perencanaan	100%	40%	100%		100%		100%		100%	80%	80%
		Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan nasional	5 Inovasi	2 Inovasi	1 Inovasi		1 Inovasi		100%		1 Inovasi	4 Inovasi	80%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu	100%	40%	100%	148.513.000	100%	120.667.809	100%	81,25%	100%	80%	80%
		Persentase rumusan	100%	40%	100%		100%		0%		100%	80%	80%

		kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian											
		Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional	16 Inovasi	-	5 Inovasi		5 Inovasi		100%		8 Inovasi	12 Inovasi	81,25%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen kajian naskah akademis draft Rancangan Peraturan Daerah yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	148.513.000	1 Dokumen	120.667.809	100%	81,25%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Inovasi Daerah yang disusun	16 Inovasi	-	5 Inovasi		6 Inovasi		120%		8 Inovasi	14 Inovasi	87,50%
		Jumlah kajian lingkup pemerintah daerah yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:**

Dari program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bangka pada tahun 2021, terdapat beberapa program yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda, yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan beberapa indicator, salah satunya indikator indeks profesionalitas ASN dengan target akhir Renstra sebesar 80,00, capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 70,08 dan menurun drastis menjadi 62,42 pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya indicator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi dengan target akhir Renstra 50,00 persen dan capaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 22,58 persen.

**2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Dari beberapa indicator kinerja program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdapat 2 (dua) indicator yang capaiannya sampai dengan tahun 2021 belum sesuai dengan target Renstra, yaitu persentase data dan informasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan dengan capaian hingga tahun 2021 sebesar 50 persen dan persentase data rencana pembangunan strategis berbasis sectoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan dengan capaian sebesar 83,33 persen.

**b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan target kinerja didapat atas pelaksanaan 6 (enam) dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - Capaian indikator program : 1) Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, 2) Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD, 3) Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD, 4) Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.
  - Capaian indicator kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sebanyak 7 (tujuh) indikator telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023.
  - Capaian indikator Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 5 (lima) dari 7 (tujuh) indikator telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023.
  - Capaian indicator Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 4 (empat) dari 4 (empat) indicator telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - Capaian indicator program berupa : 1) Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan, 2) Persentase rumusan kebijakan yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan dan 3) Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan Nasional telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023.
  - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan indikator-indikator kinerja : 1) Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu, 2) Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian dan 3) Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional, capaiannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023.
  - Capaian indicator kinerja sub kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan sebanyak 2 indikator telah sesuai dengan target.

**c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:**

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

**d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

**Faktor-faktor penyebab tidak tercapai target kinerja :**

Kejadian luar biasa Pandemi Covid 19 yang dimulai pada awal tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, mendorong terjadinya beberapa perubahan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka. Terdapat beberapa program yang ditunda pelaksanaannya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang juga berdampak pada perubahan pelaksanaan Renja Bappeda hingga tahun 2021. Kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 merupakan kegiatan-kegiatan yang mengalami kebijakan refocusing pada tahun 2021. Selanjutnya Capaian atas target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023.

**Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target kinerja :**

1. Kapasitas aparatur Bappeda yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Bappeda dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
4. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2021 Bappeda Kabupaten Bangka menyelenggarakan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Unsur Perencanaan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda**  
**Kabupaten Bangka**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Tahun			Proyeksi Tahun	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	85%	90%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang Sesuai RPJMD	82%	84%	86%	88%	88%	87,00%	83,50%	92,50%	93,00%	95%
3	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,50%	83,33%	85%	85%
4	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pencapaian target kinerja Renstra Bappeda 2019-2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase keselarasan antar perencanaan, persentase pelaksanaan Program Tahunan yang sesuai RPJMD dan persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.
2. Capaian atas indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat merupakan indikator kinerja dengan capaian yang belum sesuai dengan target Renstra.

Perkembangan kondisi dunia yang diwarnai dengan merebaknya wabah Covid-19 membawa perubahan luar biasa dalam tatanan kehidupan manusia. Terjadi berbagai penyesuaian sebagai antisipasi dan penanganan terhadap perkembangan kasus Covid-19. Termasuk proyeksi capaian kinerja Renstra Bappeda sampai akhir periode Renstra 2019-2023 yang diperkirakan tidak sesuai dengan target, yaitu : Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat yang ditargetkan sebesar 100 persen pada akhir periode Renstra diproyeksikan akan tercapai sebesar 85 persen.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

#### *1. Tingkat Pelayanan BAPPEDA*

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan UPT dan Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2023 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan, yang diukur dengan indikator persentase keselarasan perencanaan;
2. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai perencanaan yang diukur dengan indikator persentase capaian kinerja daerah yang sesuai dengan target RPJMD;
3. Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi yang diukur dengan indikator persentase data pendukung perencanaan daerah yang dimanfaatkan; dan

4. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan yang diukur dengan indicator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan.

2. *Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda*

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2014-2018) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

No	Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	Masalah	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan yang belum optimal</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya konsisten</li> <li>- Waktu perencanaan yang terbatas</li> <li>- Terdapat perbedaan kepentingan terhadap proses perencanaan</li> <li>- Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka</li> </ul>
2.	Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	Data dan informasi pendukung perencanaan yang belum sepenuhnya tersedia serta dimanfaatkan dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Sumber Daya Manusia</li> <li>- Terdapat beberapa penyedia data yang berbeda dengan metodologi yang berbeda untuk data yang sama</li> </ul>
3.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai umpan balik bagi perencanaan serta peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan periode selanjutnya	Komitmen pelaksana perencanaan yang belum maksimal



Secara struktur organisasi, struktur organisasi Bappeda saat ini berada bentuk yang relatif sesuai dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang (Bidang Sarana Prasarana, Bidang Sosial dan Ekonomi, Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Bidang Penelitian dan Pengembangan) relatif sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Akan tetapi memperhatikan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat dalam urusan perencanaan kebijakan penyetaraan jabatan structural ke dalam jabatan fungsional pada tahun 2021, memungkinkan Bappeda untuk dapat mengevaluasi struktur organisasi saat ini, utamanya dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsi pada level bidang dengan nomenklatur kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021.

### *3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda*

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya peran Bappeda yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
2. Tingginya kepercayaan Bupati dan OPD terhadap keberadaan Bappeda dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
3. Kualitas SDM Bappeda yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
6. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakannya, terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda**

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat, Propinsi dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.</li> <li>b. Dukungan Sumber Daya Manusia Bappeda dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi</li> </ul>
2.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran</li> <li>b. Dukungan Sumber Daya Manusia dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi</li> <li>c. Penerapan Kebijakan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</li> </ul>
3.	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Pemantauan perencanaan pembangunan secara berkala</li> <li>b. Pelibatan Pimpinan dalam pemantauan perencanaan pembangunan secara berkala melalui kegiatan Coffe Morning dengan Perangkat daerah</li> <li>c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan</li> <li>d. Penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</li> </ul>

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD**

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan

Awal RKPD Tahun 2023/Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023**

Rancangan Awal RKPD Kab. Bangka Tahun 2023						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01.	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	28.75	8,461,228,207.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	28.75	8,461,228,207.00	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13.00	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				13.00			
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	50,923,200.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	50,923,200.00	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar				100%			
2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 Dokumen	19,096,200.00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 Dokumen	19,096,200.00	
2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	1 Dokumen	31,827,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	1 Dokumen	31,827,000.00	
			<b>Persentase</b>	<b>0%</b>				<b>Persentase</b>	<b>0%</b>		

			temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI					temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI			
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	6,294,521,058.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	6,294,521,058.00	
2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	6,294,521,058.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	6,294,521,058.00	
			Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan				Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan		
			Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	68				Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	68		
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	48%	230,016,500.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	48%	230,016,500.00	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%				Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%		
2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	45 Stel	33,750,000.00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	45 Stel	33,750,000.00	
			Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel				Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel		

2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	14 Orang	196,266,500.00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	14 Orang	196,266,500.00	
			<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>				<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>		
<b>2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>522,238,634.00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>522,238,634.00</b>	
2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	522,238,634.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	522,238,634.00	
			Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan				Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan		
<b>2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>103,000,000.00</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>103,000,000.00</b>	
2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	103,000,000.00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	103,000,000.00	
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket		
			<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>				<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>		

2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	722,736,075.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	722,736,075.00	
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		
2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	508,277,030.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	508,277,030.00	
2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	12 Bulan	160,769,730.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	12 Bulan	160,769,730.00	
			Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani	12 Bulan				Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani	12 Bulan		
			Jumlah layanan updating website yang tertangani	12 Bulan				Jumlah layanan updating website yang tertangani	12 Bulan		
2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	12 Bulan	53,662,315.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	12 Bulan	53,662,315.00	
			<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>				<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>		
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	537,792,740.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	537,792,740.00	

2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	4 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda Dua	178,792,740.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	4 unit kendaraan Roda Dua, 3 Unit kendaraan Roda Dua	178,792,740.00	
2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	153,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	153,000,000.00	
2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	206,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	206,000,000.00	
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				2,383,410,471.00	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				2,383,410,471.00	
			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	1,150,078,381.00			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	1,150,078,381.00	
			Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%				Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%		
			Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	100%				Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	100%		
			Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN	75%				Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN	75%		
			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RKP	80%				Persentase Keselarasan RKPD terhadap RKP	80%		



2.01.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sungailiat	Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	1,150,078,381.00	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sungailiat	Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	1,150,078,381.00	
			Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	100%				Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	100%		
			Persentase aspek dalam perencanaan tahunan daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan tahunan nasional	75%				Persentase aspek dalam perencanaan tahunan daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan tahunan nasional	75%		
			Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah	100%				Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah	100%		
			Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional	75%				Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional	75%		

			Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%				Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%		
			Persentase aspek perencanaan lima tahun daerah per urusan yang ditetapkan sesuai perencanaan lima tahunan nasional	75%				Persentase aspek perencanaan lima tahun daerah per urusan yang ditetapkan sesuai perencanaan lima tahunan nasional	75%		
			Persentase aspek dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai perencanaan lima tahunan daerah	100%				Persentase aspek dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai perencanaan lima tahunan daerah	100%		
2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi	1 Dokumen	91,063,906.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sungailiat	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi	1 Dokumen	91,063,906.00	
			Jumlah dokumen usulan perencanaan kegiatan nasional dan propinsi yang diverifikasi	1 Dokumen				Jumlah dokumen usulan perencanaan kegiatan nasional dan propinsi yang diverifikasi	1 Dokumen		
2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bangka,	Jumlah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Kali	244,649,981.00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bangka, luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Kali	244,649,981.00	
			Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	1 Kali				Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	1 Kali		

2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, dan Luar Daerah	Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti	1 Kali	515,321,291.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, dan Luar Daerah	Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti	1 Kali	515,321,291.00	
			Jumlah Musrenbang Propinsi yang diikuti	1 Kali				Jumlah Musrenbang Propinsi yang diikuti	1 Kali		
			Jumlah Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang diikuti	8 Kali				Jumlah Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang diikuti	8 Kali		
			Jumlah Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tepat waktu	1 Kali				Jumlah Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tepat waktu	1 Kali		
			Jumlah RKA Responsif Gender Perangkat Daerah yang disepakati	4 RKA/OPD				Jumlah RKA Responsif Gender Perangkat Daerah yang disepakati	4 RKA/OPD		
2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD yang disusun	1 Dokumen	299,043,203.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD yang disusun	1 Dokumen	299,043,203.00	
			Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1 Dokumen		
			Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun	1 Dokumen		
			<b>Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan dalam Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>693.076.710,00</b>			<b>Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan dalam Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>693.076.710,00</b>	
			<b>Persentase dokumen rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yang dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase dokumen rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yang dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>		
			<b>Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem</b>	<b>100%</b>		

			Perencanaan Pembangunan Daerah					Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintah yang dinilai persepsinya oleh masyarakat	100%	693.076.710,00	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintah yang dinilai persepsinya oleh masyarakat	100%	693.076.710,00	
			Persentase aspek data Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Bangka yang tersedia	100%				Persentase aspek data Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Bangka yang tersedia	100%		
			Persentase Data Potensi Daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan yang tersedia	100%				Persentase Data Potensi Daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan yang tersedia	100%		
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi	100%				Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi	100%		
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi	100%				Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi	100%		
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial	100%				Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial	100%		
			Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD	100%				Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD	100%		

			Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan	100%				Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan	100%		
			Persentase Keterisian data capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem	100%				Persentase Keterisian data capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem	100%		
2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	565.987.860,00	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	565.987.860,00	
		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur ekonomi yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur ekonomi yang disusun				1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur sosial yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur sosial yang disusun				2 Dokumen			
		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang disusun				3 Dokumen			
2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Aplikasi Perencanaan yang dioperasionalsasikan	2 Aplikasi	127.088.850,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Aplikasi Perencanaan yang dioperasionalsasikan	2 Aplikasi	127.088.850,00	
		Jumlah layanan operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Jumlah layanan operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah				12 Bulan			

			Jumlah layanan up dating capaian kinerja Perangkat Daerah	4 Kali				Jumlah layanan up dating capaian kinerja Perangkat Daerah	4 Kali		
			Jumlah dokumen Indeks Persepsi Masyarakat yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen Indeks Persepsi Masyarakat yang disusun	1 Dokumen		
			<b>Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target</b>	<b>88%</b>	<b>540.255.380</b>			<b>Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target</b>	<b>88%</b>	<b>540.255.380</b>	
<b>2.03</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Sungailiat</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kerjanya secara berkala</b>	<b>100%</b>	<b>540.255.380,00</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Sungailiat</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kerjanya secara berkala</b>	<b>100%</b>	<b>540.255.380,00</b>	
			<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu</b>	<b>95%</b>				<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu</b>	<b>95%</b>		
			<b>Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan</b>	<b>100%</b>		
			<b>Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>		
2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Perjanjian Kerjanya	34 OPD	371.870.200,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Perjanjian Kerjanya	34 OPD	371.870.200,00	
			Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun	1 Dokumen		

			Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen				Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	34 OPD				Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	34 OPD		
2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	168.385.180,00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	168.385.180,00	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen		
<b>5.05.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				<b>219.970.920,00</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				<b>219.970.920,00</b>	
			Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	100%	219.970.920,00			Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	100%	219.970.920,00	
			Persentase rumusan kebijakan yang diintegrasikan Dalam Perencanaan	100%				Persentase rumusan kebijakan yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan	100%		
			Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan Nasional	1 Inovasi				Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan Nasional	1 Inovasi		
2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Sungailiat	Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan	100%	219.970.920	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Sungailiat	Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan	100%	219.970.920	

	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		sesuai periode waktu			Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		sesuai periode waktu			
			Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian	100%				Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian	100%		
			Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional	3 Inovasi				Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional	3 Inovasi		
2.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah dokumen kajian naskah akademis draft Rancangan Peraturan Daerah yang disusun	1 Dokumen	219.970.920,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah dokumen kajian naskah akademis draft Rancangan Peraturan Daerah yang disusun	1 Dokumen	219.970.920,00	
			Jumlah Inovasi Daerah yang disusun	5 Inovasi				Jumlah Inovasi Daerah yang disusun	5 Inovasi		
			Jumlah kajian lingkup pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen				Jumlah kajian lingkup pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen		
			Jumlah policy brief kebijakan pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen				Jumlah policy brief kebijakan pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen		



Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020, maka penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 mengalami penyesuaian dengan perkembangan tersebut. Penyesuaian dilakukan melalui :

1. Pemetaan ulang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Penyesuaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Renja Bappeda 2023 dengan indikator kinerja Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021

Secara rinci pemetaan ulang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.7 berikut :

**TABEL 2.7.**  
**PEMETAAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**DARI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 ke KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021**

RUMUSAN BERDASAKAN KEPMENDAGRI NO.050-3708 TAHUN 2020						RUMUSAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR.050-5889 TAHUN 2021					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN					5.01	PERENCANAAN				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.461.228.207	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.264.847.607
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah						Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah						Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	50.923.200,00	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	50.923.200,00
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%					Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	19.096.200,00	5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen : Dokumen	11.196.000,00

	Perencanaan Perangkat Daerah		kinerja yang disusun				Perencanaan Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)	
						5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ( Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	5.128.800,00
						5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	5.128.800,00
						5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	6.596.000,00

						5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	6.596.000,00
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	9 Dokumen	31.827.000,00	5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Dokumen LPPD)	10.379.600,00
						5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)	5.898.000,00
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%					Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	

5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	6.294.521.058	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		6.121.271.358
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan	6.294.521.058	5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Orang/bulan, 17 Laki-laki dan 14 Perempuan	6.054.521.058,00
						5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00
						5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	4.377.600,00
						5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1	37.372.700,00

										Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)	
			<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>					<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>	
5.01.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	48%	230.016.500	5.01.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	48%	291.266.500
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%					Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%					Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%	
5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	45 Stel	33.750.000,00	5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	35.000.000,00
						5.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)	60.000.000,00
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	14 Orang	196.266.500,00	5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	14 Orang	196.266.500,00

									Pelatihan		
									Indeks Tata Laksana Organisasi	2	
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	522.238.634	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	672.238.634
									Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	522.238.634	5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	522.238.634,00
			Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Bulan		5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	45.000.000,00
						5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	105.000.000,00
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	103.000.000	5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	103.000.000,00
5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	103.000.000,00	5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	103.000.000,00

			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket					yang Disediakan		
			<b>Indeks Tata Laksana Organisasi</b>	2					<b>Indeks Sarana dan Prasarana</b>	100%	
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	722.736.075	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	620.107.915,00
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan							
5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	508.277.030,00	5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	446.364.600,00
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	12 Bulan	160.796.730,00	5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.081.000,00
			Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani	12 Bulan							
			Jumlah layanan updating website yang tertangani	12 Bulan							
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	12 Bulan	53.662.315,00	5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.662.315,00
			<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	100%					<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	100%	
5.01.01.	<b>Kegiatan</b>		<b>Persentase</b>	100%	537.792.740	5.01.01.	<b>Kegiatan</b>		<b>Persentase</b>	100%	406.040.000



<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BMD dalam kondisi baik</b>			<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BMD dalam kondisi baik</b>		
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	4 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda Dua	178.792.740,00	5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit Mobil dan 3 Unit Motor	172.540.000,00
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	153.000.000,00	5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	32.050.000,00
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	206.000.000,00	5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	201.450.000,00
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>2.383.410.471</b>	<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>2.260.991.082</b>
			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	1.150.078.381				Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	1.102.022.536
			Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%					Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	
			Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RPKD	100%					Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RPKD	100%	
			Persentase	75%					Persentase	75%	

			Keselarasn RPJMD terhadap RPJMN	80%					Keselarasn RPJMD terhadap RPJMN	80%	
			Persentase Keselarasn RKPD terhadap RKP						Persentase Keselarasn RKPD terhadap RKP		
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	1.150.078.381	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	1.102.022.536
			Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	100%					Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	100%	
			Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	78%					Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah	78%	
			Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan	100%					Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan	100%	

			sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah						sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah		
			Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional	78%					Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional	78%	
			Persentase aspek dalam Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%					Persentase aspek dalam Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	
			Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%					Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	100%	
						5.01.02.2. 01.01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD)	1 Dokumen Ranwal RKPD dan 1 Dokumen Ranwal RPJMD	146.450.000,00
5.01.02.2. 01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi	34 Dokumen	91.063.906,00	5.01.02.2. 01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen	91.063.906,00

	dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah dokumen usulan perencanaan kegiatan nasional dan propinsi yang diverifikasi	1 Dokumen			Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Daerah		
						5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	56.250.000,00
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Kali	244.649.981,00	5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	73.236.250,00
			Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	1 Kali							
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti	1 Kali	515.321.291,00	5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	284.940.000,00
			Jumlah Musrenbang Propinsi yang diikuti	1 Kali							
			Jumlah Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang diikuti	8 Kali							
			Jumlah Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tepat waktu	1 Kali							
			Jumlah Sub Kegiatan Responsif Gender Perangkat Daerah yang disepakati	4 Sub Kegiatan/OPD							
						5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi	Kab. Bangka	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	405 Usulan	55.000.000,00

							Musrenbang Kecamatan		Kecamatan		
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD yang disusun	1 Dokumen	299.043.203,00	5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	395.082.380,00
			Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen RKPD Perubahan yang disusun	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) yang disusun	1 Dokumen							
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD	100%	693.076.710	5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD	100%	758.713.166
			Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan	100%					Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan	100%	
			Persentase Keterisian data capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem	100%					Persentase Keterisian data capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem	100%	
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi	100%					Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi	100%	
			Persentase Pemenuhan	100%					Persentase Pemenuhan	100%	

			<b>Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi</b>						<b>Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi</b>		
			<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial</b>	<b>100%</b>					<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial</b>	<b>100%</b>	
			<b>Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintah yang dinilai persepsinya oleh masyarakat</b>	<b>100%</b>					<b>Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintah yang dinilai persepsinya oleh masyarakat</b>	<b>100%</b>	
			<b>Persentase aspek data Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Bangka yang tersedia</b>	<b>100%</b>					<b>Persentase aspek data Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Bangka yang tersedia</b>	<b>100%</b>	
			<b>Persentase Data Potensi Daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan yang tersedia</b>	<b>100%</b>					<b>Persentase Data Potensi Daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	565.987.860,00	5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	548.074.316,00
			Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur ekonomi yang disusun	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen	2 Dokumen							

			perencanaan pembangunan Infrastruktur sosial yang disusun								
			Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang disusun	3 Dokumen							
5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Aplikasi Perencanaan yang dioperasionalisasikan	2 Aplikasi	127.088.850,00	5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	136 Orang	107.088.850,00
			Jumlah layanan operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan							
			Jumlah layanan up dating capaian kinerja Perangkat Daerah	4 Kali							
			Jumlah dokumen Indeks Persepsi Masyarakat yang disusun	1 Dokumen		5.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	103.550.000,00
			<b>Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target</b>	<b>88%</b>					<b>Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target</b>	<b>88%</b>	
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala	100%	540.255.380	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala	100%	400.255.380

			Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu	100%					Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu	100%	
			Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan	100%					Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan	100%	
			Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%					Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%	
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Perjanjian Kinerjanya	34 OPD	371.870.200,00	5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	147 Laporan : 136 Laporan Evaluasi Renja PD, 4 Laporan Pengendalian RKPD, 2 Laporan Perjanjian Kinerja, 4 Laporan Monitoring Pelaksanaan DAK, 1 Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan	271.870.200,00
			Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen							
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	34 OPD							
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	168.385.180,00	5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan : 1 Laporan Capaian Pembangunan Daerah, 1 Laporan	128.385.180,00
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen							



			<i>Laporan Capaian Pembangunan Daerah yang disusun</i>				<i>Daerah</i>			<i>Evaluasi RPJMD, dan 1 Laporan Pemanfaatan DAK</i>	
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	100%	219.970.920	5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	100%	538.770.909
			Persentase rumusan kebijakan yang diintegrasikan dalam perencanaan	100%					Persentase rumusan kebijakan yang diintegrasikan dalam perencanaan	100%	
			Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan nasional	1					Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan nasional	1	
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu	100%	219.970.920	5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian	100%	126.570.047,00
			Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian	100%							
			Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional	5 Inovasi							
5.05.02.2.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Kelitbangan	Kab. Bangka dan Luar	Jumlah dokumen kajian naskah akademis draft	1 Dokumen	219.970.920	5.05.02.2.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Kelitbangan	Kab. Bangka dan Luar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	2 Dokumen	126.570.047,00

	<i>Peraturan</i>	<i>Daerah</i>	<i>Rancangan Peraturan Daerah yang disusun</i>			<i>Peraturan</i>	<i>Daerah</i>	<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>			
			<i>Jumlah Inovasi Daerah yang disusun</i>	<i>1 Dokumen</i>							
			<i>Jumlah kajian lingkup pemerintah daerah yang disusun</i>	<i>1 Dokumen</i>							
			<i>Jumlah policy brief kebijakan pemerintah daerah yang disusun</i>	<i>1 Dokumen</i>							
						<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>Persentase penelitian bidang social dan kependudukan yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu</b>	<b>100%</b>	<b>151.570.047,00</b>
						<i>5.05.02.2.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>151.570.047,00</i>
						<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Persentase penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>84.060.768,00</b>

								<b>sesuai periode waktu</b>			
						5.05.02.2.03.04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	84.060.768,00	
						<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional</b>	<b>5 Inovasi</b>	<b>176.570.047,00</b>	
						5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	176.570.047,00	
<b>JUMLAH</b>					<b>11.064.609.598</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>11.064.609.598</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Bappeda Tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana disajikan dalam table 2.8 berikut :

**Tabel 2.8**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Bangka**

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

##### **Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)**

##### **Prioritas 1: Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**

###### **Program Prioritas :**

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan Pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan investasi disektor riil dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

##### **Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

###### **Program Prioritas :**

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pembangunan Wilayah Papua

### **Prioritas 3 : Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

#### **Program Prioritas :**

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Nasional Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

### **Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

#### **Program Prioritas :**

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

### **Prioritas 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar**

#### **Program Prioritas :**

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur Ekonomi;
3. Infrastruktur Perkotaan;
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi digital;

## **Prioritas 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim**

Program Prioritas :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.; dan
3. Pembangunan rendah karbon.

## **Prioritas 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**

Program Prioritas :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
5. Menjaga stabilitas keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Bangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada prioritas nasional ke-tujuh dengan Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator kinerja nasional “Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B Keatas terhadap SAKIP (%)” melalui peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda**

Dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. *Tujuan*

Tujuan yang diformulasikan oleh Bappeda Kabupaten Bangka adalah terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

## 2. *Sasaran*

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran dirumuskan Bappeda Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan
- b. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai perencanaan
- c. Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
- d. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan

## 3.2. **Program dan Kegiatan**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya. Sesuai dengan hasil pemetaan antara Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2023 dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, dalam Rancangan Renja Bappeda Tahun 2023, Bappeda Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Bangka, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Sub Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan SKPD
- Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
  - Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023, Program dan Kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan :

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2019-2023;
- b. Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021

Selain hal-hal tersebut diatas, penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan serta penetapan pagu indikatif Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 mempertimbangan masa berakhirnya periode perencanaan jangka menengah tahun 2019-2023. Mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 telah mengantisipasi kewajiban penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam instruksi tersebut yang selanjutnya merubah pagu indikatif antar sub kegiatan, kegiatan dan program dalam Renja Bappeda Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2023.

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

**TABEL 4.1.**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**(SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI No. 050-5889 TAHUN 2021)**

**OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.193.846.350,00				8.193.846.350,00
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		28.50	50.923.200,00			28.75	50.923.200,00
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		12.60				13.00	

5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Sungailiat	100%	50.923.200,00			100%	50.923.200,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	8 Dokumen : Dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, Dokumen Rancangan Perubahan Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi	11.196.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Dokumen : Dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, Dokumen Rancangan Perubahan Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi	11.196.000,00
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ( Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	5.128.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ( Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	5.128.800,00

5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	5.128.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	5.128.800,00
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	6.596.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	6.596.000,00
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	6.596.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	6.596.000,00
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Bangka	4 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1	10.379.600,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1	10.379.600,00

		<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Laporan LPPD)</i>				<i>Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Laporan LPPD)</i>	
5.01.01.2.01.07	<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi</i>	<i>5.898.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi</i>	<i>5.898.000,00</i>
		<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>		<i>0%</i>	<i>6.121.271.140,00</i>			<i>0%</i>	<i>6.121.271.140,00</i>
5.01.01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar</i>		<i>100%</i>	<i>6.121.271.140,00</i>			<i>100%</i>	<i>6.121.271.140,00</i>
5.01.01.2.02.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>31 Orang/Bulan (17 Laki-Laki, 14 Perempuan)</i>	<i>6.054.521.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>31 Orang/Bulan (17 Laki-Laki, 14 Perempuan)</i>	<i>6.054.521.000,00</i>
5.01.01.2.02.03	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>25.000.000,00</i>
5.01.01.2.02.05	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir</i>	<i>4.377.600,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir</i>	<i>4.377.600,00</i>

		<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		<i>Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)</i>				<i>Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)</i>	
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	40 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)	37.372.540,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)	37.372.540,00
		Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah		70.00	276.578.200.00			71.00	276.578.200.00
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Sungailiat	48%	276.578.200.00			48%	276.578.200.00



		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		100%				100%	
5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Bangka	2 Paket	44.900.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Paket	44.900.000,00
5.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Bangka	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/ LHKPN, KP4)	35.411.700,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/ LHKPN, KP4)	35.411.700,00
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	14 Orang	196.266.500,00	Dana Alokasi Umum	P1	14 Orang	196.266.500,00
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		2	672.288.450,00			2	672.288.450,00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	672.288.450,00			100%	672.288.450,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan		3 Layanan				3 Layanan	

		teknologi informasi							
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	522.288.450,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	522.288.450,00
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	45.000.000,00
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	105.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	105.000.000,00
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	101.565.700,00			100%	101.565.700,00
5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Bangka	12 Unit	101.565.700,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Unit	101.565.700,00
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	565.179.660,00			100%	565.179.660,00
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	565.179.660,00			100%	565.179.660,00

5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	446.364.320,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	446.364.320,00
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	74.481.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	74.481.000,00
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	44.334.340,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	44.334.340,00
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	406.040.000,00			100%	406.040.000,00
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	406.040.000,00			100%	406.040.000,00
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Bangka	4 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda Dua	172.540.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda Dua	172.540.000,00
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Bangka	40 Unit	32.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Unit	32.050.000,00
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	201.450.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	201.450.000,00

5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.336.741.300,00				2.336.741.300,00
		Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD		100.00%	1.178.603.400,00			100.00%	1.178.603.400,00
		Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD		100.00%				100.00%	
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD		100.00%				100.00%	
		Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN		75.00%				75.00%	
		Persentase Keselarasan RKPD terhadap RKP		80.00%				85.00%	
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase aspek perencanaan lima tahunan daerah teknokratik per urusan yang disusun sesuai standar		-	1.178.603.400,00			100%	1.178.603.400,00
		Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar		100%				100%	

		Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah		100%				100%	
		Persentase aspek dalam perencanaan tahunan daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan tahunan nasional		78%				80%	
		Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah		100%				100%	
		Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional		78%				80%	
		Persentase aspek dalam Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar		100%				100%	

		Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar		100%				100%	
5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen RPD)	146.450.000.00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen RPD)	146.450.000.00
5.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kab. Bangka	1 Dokumen	119.690.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	119.690.000,00
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bangka	1 Berita Acara	37.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Berita Acara	37.050.000,00
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bangka	2 Berita Acara	73.236.250.00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Berita Acara	73.236.250.00
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	1 Berita Acara	461.140.000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Berita Acara	461.140.000.00
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	Kab. Bangka	405 Usulan	30.600.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	405 Usulan	30.600.000,00
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	4 dokumen	310.437.150.00	Dana Alokasi Umum	P1	4 dokumen	310.437.150.00

		Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan		100%	649.364.600,00			100%	649.364.600,00
		Persentase data rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yg dimanfaatkan dalam perencanaan		100%				100%	
		Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		100%				100%	
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD		100%	649.364.600,00			100%	649.364.600,00
		Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan		100%				100%	
		Persentase Keterisian data capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi		100%				100%	

		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial		100%				100%	
		Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintah yang dinilai persepsinya oleh masyarakat		100%				100%	
		Persentase aspek data Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Bangka yang tersedia		100%				100%	
		Persentase Data Potensi Daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan yang tersedia		100%				100%	
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka dan Luar Daerah	5 Dokumen	294.058.600,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	294.058.600,00
5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Kab. Bangka	136 Orang	154.028.400,00	Dana Alokasi Umum	P1	136 Orang	154.028.400,00



5.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Kab. Bangka	1 Buku	201.277.600.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Buku	201.277.600.00
		Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target		91%	508.773.300.00			91%	508.773.300.00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kerjanya secara berkala	Sungailiat	100%	508.773.300.00			100%	508.773.300.00
		Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu		95%				100%	
		Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan		100%				100%	
		Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		100%				100%	
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangka	136 Dokumen Evaluasi Renja PD, 4 Dokumen Pengendalian RKPD, 2 Dokumen Perjanjian Kinerja, 4 Laporan Monitoring Pelaksanaan DAK, 1 Dokumen	308.997.100.00	Dana Alokasi Umum	P1	136 Dokumen Evaluasi Renja PD, 4 Dokumen Pengendalian RKPD, 2 Dokumen Perjanjian Kinerja, 4 Laporan Monitoring Pelaksanaan DAK, 1 Dokumen	308.997.100.00

				<i>Kesesuaian Dokumen Perencanaan</i>				<i>Kesesuaian Dokumen Perencanaan</i>	
5.01.02.2.03.03	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>3 Dokumen : 1 Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah, 1 Dokumen Laporan Evaluasi RPJMD, 1 Dokumen Laporan Pemanfaatan DAK</i>	199.776.200,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>3 Dokumen : 1 Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah, 1 Dokumen Laporan Evaluasi RPJMD, 1 Dokumen Laporan Pemanfaatan DAK</i>	199.776.200,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				534.021.850,00				534.021.850,00
		Persentase rumusan kebijakan yang diintegrasikan dalam perencanaan		100%				100%	
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian	Sungailiat	100%	126.570.050,00			100%	126.570.050,00
5.05.02.2.01.12	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>2 dokumen</i>	126.570.050,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>2 dokumen</i>	126.570.050,00

		Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan		100%				100%	
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu		100%	151.570.050,00			100%	151.570.050,00
5.05.02.2.02.01	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>151.570.050,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>151.570.050,00</i>
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu		100%	84.060.750,00			100%	84.060.750,00
5.05.02.2.03.04	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>84.060.750,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>84.060.750,00</i>
		Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan nasional		1				1	
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi nasional		5 Inovasi	175.821.000,00			5 Inovasi	175.821.000,00

5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bangka	5 Dokumen (5 Dokumen Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi Inovasi Tingkat Nasional Sinovik, IGA Award)	175.821.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen (5 Dokumen Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi Inovasi Tingkat Nasional Sinovik, IGA Award)	175.821.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>11.064.609.500.00</b>				<b>11.064.609.500.00</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 memuat rencana operasional pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 melalui pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan 3 (tiga) program dengan total pagu anggaran relatif sama dengan pagu pada Rancangan Awal Renja yaitu sebesar Rp. 11.064.609.500,00 (sebelas milyar enam puluh empat juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Selain itu, Renja ini juga mempedomani Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah perubahan indikator sub kegiatan yang mengacu kepada Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 yang dilakukan melalui pemetaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kegiatan Rancangan Awal Renja 2023 dengan Kepmendagri Nomor. 050-5889 Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Berita Acara Kesepakatan dengan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Bappeda serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2023, dimana selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2023 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda Kabupaten Bangka wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2023 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala.
4. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 mencakup :

1. Penyusunan Anggaran Bappeda Tahun 2023 dengan mengacu kepada Renja Bappeda tahun 2023.
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sungailiat, Agustus 2022  
Kepala Bappeda Kab. Bangka



Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si  
NIP. 19661214 199203 1 004